

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Akuntansi adalah ilmu yang saat ini berkembang dengan pesat, khususnya dalam bidang akuntansi pemerintahan. Akuntansi pemerintahan adalah salah satu bidang ilmu akuntansi yang terjadi di badan pemerintahan. Adanya tuntutan akuntabilitas dan transparansi atas pencatatan transaksi-transaksi, dan pelaporan kinerja pemerintahan oleh pihak-pihak yang berkepentingan bukan hanya sebagai bentuk kewajiban dari pemerintah pusat, namun juga daerah seperti desa. Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat ditentukan oleh kemajuan desa, karena tidak ada negara yang maju tanpa provinsi yang maju, tidak ada provinsi yang maju tanpa desa dan kelurahan yang maju. Ini berarti bahwa basis kemajuan sebuah negara ditentukan oleh kemajuan desa. Desa memiliki peran yang penting, khususnya dalam pelaksanaan tugas di bidang pelayanan publik. Desentralisasi kewenangan-kewenangan yang lebih besar disertai dengan pembiayaan dan

bantuan sarana prasarana yang memadai mutlak diperlukan guna penguatan otonomi desa menuju kemandirian desa.²

Undang-Undang negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 mengangkat desa hanya bukan sekedar desa. Selain menjadi subjek pembangunan bagi suatu negara. Desa juga bisa menjadi objek pembangunan bagi suatu Negara. Jadi, desa bisa menjadi objek pembangunan kesejahteraan tidak hanya subjek saja. Peraturan perundang-undangan menekankan komitmen politik dan konstitusional bahwa negara melindungi dan memberdayakan masyarakat desa agar menjadi mandiri, maju, kuat, dan demokratis sehingga mampu menciptakan prinsip yang kokoh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur, dan sejahtera.³

Pada saat perkembangan daerah dimulai, desa-desa sudah di berikan kekuasaan untuk mengelola keuangan secara mandiri dan melaksanakan pemerintahan untuk pembangunan desa yang lebih baik. Setiap desa diberikan kebebasan dalam menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan yang nantinya dibuat oleh pemerintah desa sebagai penyedia informasi yang dapat digunakan sebagai pedoman menyusun anggaran pada tahun selanjutnya. Laporan keuangan ada dan disusun untuk menyediakan informasi yang efektif dan relevan mengenai transaksi keuangan dan seluruh kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh sebuah

² Neny Tri Indrianasari, 2017, "*Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa*",(Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi dan Pajak, Vol.1 No.2), hal 2

³ Harnita Rahayu, 2019, "*Analisis Penerapan Sistem dan Prosedur Akuntansi Dalam Pengelolaan Dana Desa*", (Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, Vol.8 No.5), hal 2

entitas pelaporan. Seiring dengan reformasi dibidang keuangan negara, maka perlu dilakukan perubahan diberbagai bidang keuangan negara agar dapat berjalan dengan baik. Salah satu perubahan yang signifikan adalah perubahan dibidang akuntansi pemerintah karena melalui proses akuntansi dihasilkan sebuah informasi keuangan yang tersedia berbagai pihak untuk digunakan sesuai dengan tujuan masing-masing. Pengelolaan keuangan desa harus dilakukan dengan baik agar tidak terjadi kecurangan-kecurangan dalam mengelola anggaran desa.⁴

Menurut Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan Keuangan Desa, yang berarti keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pemerintah daerah mempunyai tanggungjawab yang besar dalam memantau kinerja pemerintah desa di dalam pengelolaan keuangan desa tersebut. Dalam mengelola keuangan desa khususnya Dana desa diharapkan pemerintah desa dapat memanfaatkan potensi sumber daya alam yang dimiliki untuk memajukan dan mengembangkan desanya sendiri. Dan untuk membantu pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa,⁵

⁴ Jehan M. Malaika, dkk, "*Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKUEDES) Pada Organisasi Pemerintahan Desa*", (Jurnal Riset Akuntansi Going Concern Vol. 13 No.4, 2018), hal 1

⁵ Harnita Rahayu, "*Analisis Penerapan Sistem dan Prosedur Akuntansi Dalam Pengelolaan Dana Desa*", (Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, Vol.8 No.5, 2019), hal 2

Seiring perkembangan teknologi dan informasi saat ini Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama Menteri Dalam Negeri membuat suatu aplikasi yang bertujuan untuk meningkatkan mutu dan kualitas tata kelola keuangan desa. Aplikasi yang dimaksud adalah Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Tujuan Pemerintah dalam mengembangkan Aplikasi Sistem Keuangan Desa tersebut adalah untuk membantu pemerintah desa agar lebih mandiri dalam mengelola keuangan desa secara efektif dan relevan, serta meningkatkan transparansi dalam akuntabilitas keuangan di desa. Dengan adanya aplikasi sistem keuangan desa tersebut diharapkan pemerintah desa lebih mandiri dan lebih bekerja keras dalam mengelola unsur pemerintahan dan sumber daya alam yang dimiliki.⁶

Aplikasi Sistem Keuangan Desa merupakan aplikasi yang dibuat sederhana dan mudah digunakan sehingga memudahkan penggunanya untuk mengoperasikannya. Dengan satu kali proses penginputan sesuai dengan transaksi yang ada, dapat menghasilkan output berupa dokumen penatausahaan dan laporan – laporan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku, dengan demikian Aplikasi Sistem Keuangan Desa ini sangat membantu aparatur pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa. Aparatur desa di seluruh Indonesia yang mempunyai tugas mengelola keuangan desa seharusnya sudah menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa yang dapat

⁶ Jehan M. Malaika, dkk, “Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKUEDES) Pada Organisasi Pemerintahan Desa”, (Jurnal Riset Akuntansi Going Concern Vol. 13 No.4, 2018), hal 2

membantu pelaksanaan tugas tersebut mengingat aplikasi tersebut sudah diluncurkan pada tahun 2015.⁷

Dengan adanya Aplikasi Sistem Keuangan Desa tersebut sudah memberikan dampak pada para pegawai, yaitu memberikan motivasi untuk bekerja dengan baik dan benar, kegiatan operasional yang lebih tertata secara administratif, mengurangi adanya kecurangan, meningkatkan kinerja pegawai, dan dapat menciptakan laporan keuangan yang akuntabel. Penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa sangat membawa perubahan yang baik, mempermudah dalam proses pelaporan pertanggungjawaban dan memberikan hasil peningkatan kualitas desa yang baik, menghasilkan pelaporan keuangan yang sesuai dengan waktu yang ditentukan, dan menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel. Besarnya peranan Aplikasi Sistem Keuangan Desa dalam pengelolaan keuangan membuat semakin pentingnya aplikasi ini untuk diterapkan di desa-desa.⁸

Selain itu pembuatan Aplikasi Sistem Keuangan Desa juga bertujuan untuk meningkatkan kinerja aparatur Pemerintah Desa dalam melakukan pengelolaan keuangan desa. Kinerja itu sendiri adalah Refleksi dari sikap pribadi seseorang individu atau sekelompok tentang pekerjaan atau kerjasama, seperti sikap pegawai dalam bekerja dan kinerja pegawai yang dipengaruhi oleh kebijakan

⁷ Febri Eko Lusiono dan Suharman, “Analisis Penerimaan Aplikasi SISKUEDES di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas”, (Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis Vol. 5 No. 2, 2017), hal 2

⁸ Martini Ria, Resy Agustin, dkk, “Pengelolaan Keuangan Berbasis Aplikasi Sistem Keuangan Desa”, (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 25 No.2, 2017), hal 3

yang dibuat oleh pimpinan dalam melaksanakan pekerjaan.⁹ Kemudian terkait Aplikasi Sistem Keuangan Desa itu sendiri juga memiliki berbagai kelebihan dan kekurangan dalam proses pengoperasiannya. Sementara itu Pemerintah Desa Jabon itu sendiri dalam melakukan pengelolaan keuangan itu memakai 2 metode yaitu metode manual dan aplikasi. Untuk metode manual itu sendiri yaitu lewat Microsoft Excel dan untuk metode aplikasi itu sendiri itu menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa.

Agar terwujudnya pengelolaan keuangan Desa dengan menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa dalam Kinerja Pemerintah Desa pada Desa Jabon Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung secara baik dan terperinci serta dapat membawa berkembangnya Pemerintah Desa dalam melakukan pengelolaan keuangan desa, disini seorang peneliti mengambil judul **“Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintah Desa Jabon Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung”** Alasan saya mengambil judul tersebut yaitu karena pada saat ini kalau berbicara keuangan harus secara transparansi, jujur dan bertanggungjawab maka dari itu akuntansi datang sebagai pembantu untuk menyusun laporan keuangan desa yang sesuai dengan peraturan pemerintah.

⁹ A. Pananrangi M, *“Kinerja Pemerintah Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan di Desa Siawung Kecamatan Barru Kabupaten Barru”*, (Meraja Journal Vol. 2, No. 1, 2019), hal 3

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana penerapan aplikasi sistem keuangan desa dalam kinerja pemerintah Desa Jabon Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung ?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi dalam penerapan aplikasi sistem keuangan desa dalam kinerja pemerintah Desa Jabon Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung ?
3. Bagaimana solusi yang dilakukan oleh pemerintah Desa Jabon Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung ketika menghadapi kendala dalam penerapan aplikasi sistem keuangan desa ?
4. Bagaimana kesesuaian penerapan aplikasi sistem keuangan desa dalam kinerja pemerintah Desa Jabon Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung itu apa sudah sesuai dengan PAMENDAGRI nomor 20 tahun 2018 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada fokus penelitian diatas, maka ada pun tujuan dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mendeskripsikan penerapan aplikasi sistem keuangan desa dalam kinerja pemerintah Desa Jabon Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung.

2. Untuk Mendeskripsikan kendala yang dihadapi dalam penerapan aplikasi sistem keuangan desa dalam kinerja pemerintah Desa Jabon Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung.
3. Untuk mendeskripsikan solusi yang dilakukan oleh pemerintah Desa Jabon Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung ketika menghadapi kendala dalam penerapan aplikasi sistem keuangan desa.
4. Untuk Mendeskripsikan Tentang kesesuaian penerapan aplikasi sistem keuangan desa dalam kinerja pemerintah Desa Jabon Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung yang sesuai dengan PAMENDAGRI nomor 20 tahun 2018.

D. Identifikasi Penelitian dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti mengidentifikasi masalah mengenai penerapan aplikasi sistem keuangan desa dalam kinerja pemerintah Desa Jabon Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung. Kemudian tentang kesesuaian penerapan aplikasi sistem keuangan desa pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa.

2. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari tujuan penelitian, maka keterbatasan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Menetapkan objek penelitian yaitu pada Desa Jabon Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung.
- b. Penelitian ini hanya melihat tentang penerapan aplikasi sistem keuangan desa dalam kinerja pemerintah Desa Jabon Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung.
- c. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder. Data primer didapatkan secara langsung dari narasumber melalui wawancara. Data skunder didapatkan dari dokumen – dokumen yang ada di kantor Desa Jabon Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung.

E. Manfaat Penelitian

Sehubungan dengan adanya penelitian tersebut, diharapkan pada penelitian ini bermanfaat bagi :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan edukasi dan pengetahuan bagi pembaca terkait dengan teori sistem informasi akuntansi khususnya dapat diterapkan di pemerintah desa.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi IAIN Tulungagung

Dari penelitian ini diharapkan bisa dijadikan referensi sebagai bahan untuk penelitian selanjutnya guna mempermudah pengetahuan dalam

mempelajari materi sistem informasi akuntansi khususnya yang terdapat pada pemerintah desa.

b. Bagi Pemerintah Desa

Hasil dari penelitian sangat bermanfaat bagi pemerintah desa karena dapat memberikan gambaran secara nyata pada pemerintah tentang penerapan aplikasi sistem keuangan desa secara baik dan benar agar terciptanya pengelolaan keuangan yang benar.

c. Bagi Mahasiswa

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan guna menambah wawasan dan pengetahuan mahasiswa serta dapat digunakan sebagai perbandingan untuk penelitian dikemudian hari.

F. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

a. Sistem Informasi Akuntansi

Sistem informasi akuntansi adalah jaringan dari seluruh prosedur, formulir – formulir, catatan – catatan, dan alat – alat yang digunakan untuk mengolah data keuangan menjadi suatu bentuk laporan yang akan digunakan oleh pihak manajemen dalam mengendalikan kegiatan

usahanya dan selanjutnya digunakan sebagai alat pengambilan keputusan manajemen.¹⁰

b. Aplikasi Sistem Keuangan Desa

Aplikasi Sistem Keuangan Desa merupakan aplikasi yang di buat oleh BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Perkembangan) dan Menteri Dalam Negeri untuk membantu pemerintah desa dalam melakukan pelaporan keuangan desa. Aplikasi ini sangat mudah untuk digunakan oleh pemerintah desa karena fitur yang tersedia sangatlah mudah untuk dipahami dan dimengerti. Dengan tampilan yang sederhana membuat aplikasi ini terlihat sangat sederhana namun sangat baik untuk digunakan. Bisa digunakan secara online maupun offline.

Aplikasi ini dibuat sudah menyesuaikan dengan proses dan tahap laporan keuangan dan dokumen-dokumen yang ada hanya akan di input saja karena sudah tertata dengan baik.¹¹

c. Kinerja Pemerintah

Refleksi dari sikap pribadi seseorang individu atau sekelompok tentang pekerjaan atau kerjasama, seperti sikap pegawai dalam bekerja dan

¹⁰ Anna Marina dkk, *Sistem Informasi Akuntansi*, (Surabaya: UM Surabaya, 2017), hal. 32

¹¹Jehan M. Malaika, dkk, “*Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKUEDES) Pada Organisasi Pemerintahan Desa*”, (Jurnal Riset Akuntansi Going Concern Vol. 13 No.4, 2018), hal 2

kinerja pegawai yang dipengaruhi oleh kebijakan yang dibuat oleh pimpinan dalam melaksanakan pekerjaan.¹²

2. Definisi Operasional

Berdasarkan pada penelitian ini, definisi operasional yang dimaksud dalam judul “Penerapan Aplikasi Sisitem Keuangan Desa Dalam Kinerja Pemerintah Desa Jabon Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung” itu adalah kesimpulan dari hasil penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa yang digunakan oleh pegawai yang ada di pemerintah Desa Jabon. Aplikasi Sistem Keuangan Desa itu sendiri dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan tata kelola keuangan yang ada di Desa Jabon Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika skripsi merupakan bantuan yang dapat digunakan oleh pembaca untuk mempermudah mengetahui urutan-urutan sistematika dari isi dari skripsi. Sistematika skripsi ini dibagi menjadi tiga, bagian utama, yaitu bagian awal, bagian utama dan bagian akhir. Untuk lebih rincinya dijelaskan sebagai berikut :

¹² A. Pananrangi M, “*Kinerja Pemerintah Dalam Pelayanan Adminitrasi Kependudukan di Desa Siawung Kecamatan Barru Kabupaten Barru*”, (Meraja Journal Vol. 2, No. 1, 2019), hal 3

BAGIAN AWAL

Bagian ini terdiri dari halaman sampul depan, halaman sampul dalam, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan penguji, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar, halaman daftar lampiran, dan halaman abstrak.

BAGIAN UTAMA

Bagian ini merupakan inti dari hasil penelitian yang terdiri dari enam bab dan masing-masing bab terdiri dalam sub bab yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memberikan gambaran secara singkat apa yang akan dibahas dalam penelitian ini. Di dalam bab ini didalamnya menyajikan beberapa unsur yang terdiri dari : latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika skripsi.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini memuat uraian tentang tinjauan pustaka atau buku-buku teks yang berisi teori-teori besar (*grand theory*) dan kajian penelitian terdahulu.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini berisi uraian tentang paparan data yang disajikan dengan topik sesuai rumusan masalah dan hasil analisis data.

BAB V PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi pembahasan mengenai keterkaitan antara pola-pola, kategori dan dimensi, posisi temuan atau teori yang dikemukakan terhadap teori-teori temuan sebelumnya, serta penjelasan dari temuan teori yang diungkap dari lapangan (*grounded theory*).

BAB VI PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran atau rekomendasi dari hasil penelitian yang ditujukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

BAGIAN AKHIR

Bagian yang merupakan bagian akhir dalam skripsi yang berisi uraian tentang daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan dan daftar riwayat hidup.